

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara di dunia cenderung berpartisipasi terlibat dalam perdagangan internasional dengan negara lain (Sadono Sukirno, 2019). Keterlibatan ini terjadi karena negara tidak mampu memproduksi barang atau jasa tertentu yang tidak tersedia di dalam negerinya. Selain itu, perdagangan internasional juga dimaksudkan untuk memperluas pasar, meningkatkan produksi, meningkatkan devisa melalui aktivitas ekspor dan impor, menciptakan peluang kerja, dan mendorong transfer teknologi (Nugroho, 2020).

Indonesia memiliki potensi besar dalam hal luas lahan dan keberagaman sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi negara ini. Salah satu manfaatnya terletak pada peningkatan perdagangan (Aurul, 2019). Sejalan dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan proteksi dan pembatasan perdagangan. Kebijakan ini termasuk penerapan tarif dan pajak impor, pengaturan kuota impor, pembatasan penggunaan mata uang asing, serta berbagai hambatan perdagangan non-tarif. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menjaga produk-produk domestik agar terlindungi dari persaingan produk impor.

Upaya untuk meningkatkan ekspor, terutama dalam hal kuantitas dan variasi barang atau jasa, selali dilakukan melalui berbagai strategi. Fokus utamanya adalah pada ekspor non-migas, termasuk barang dan jasa, dengan tujuan untuk

meningkatkan daya saing global produk Indonesia dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mayoritas warga Indonesia berada di sektor pertanian, yang merupakan komponen penting dari sektor non-migas yang memberikan kontribusi signifikan dalam mendapatkan devisa negara melalui ekspor produk pertanian. Sektor pertanian ini menjadi pilar penting dalam perdagangan internasional (Ayu & Permatasari, 2015).

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sektor pertanian memiliki dampak yang penting dalam ekonomi Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencapai sekitar 12,40% pada tahun 2022. Posisinya berada di urutan keempat setelah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 12,85% (BPS, 2022). Hal ini mengaskan bahwa sektor pertanian memiliki dampak yang penting terhadap pembentukan pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) Negara Indonesia.

Subsektor Perkebunan, sebagai bagian penting dari sektor pertanian, memiliki potensi yang signifikan. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 3,76% pada tahun 2022, serta 0,30% terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional, terutama dengan mengandalkan beberapa komoditas unggulan yang diekspor secara internasional (Lestari, 2018). Salah satu dari komoditas unggulan tersebut adalah kakao (Niko Ramadhani, 2021).

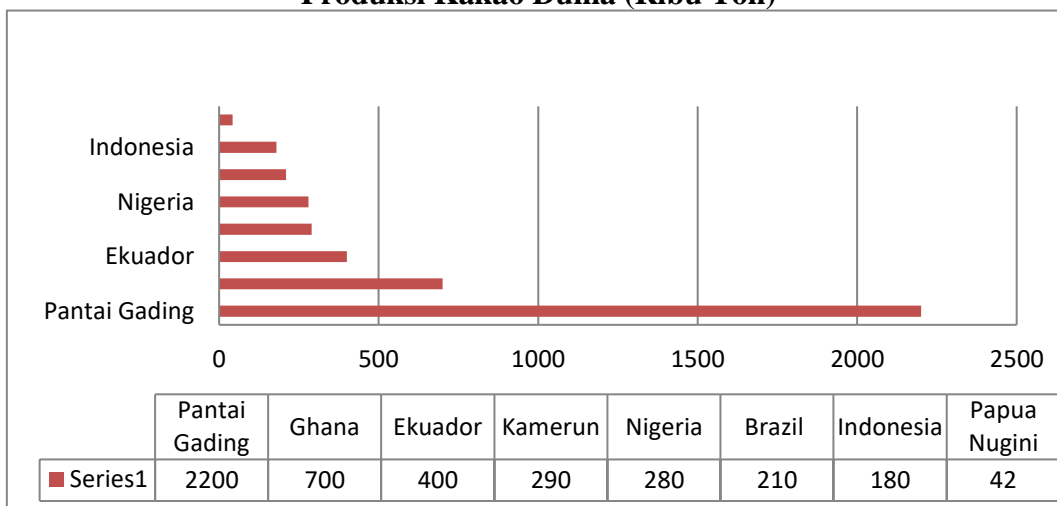
Biji kakao, yang berasal dari buah kakao (*Theobroma cacao L.*) merupakan bahan dasar utama dalam pembuatan coklat. Karakteristik biji kakao bervariasi dan

berpengaruh pada kualitas coklat yang dihasilkan. Produk olahan biji kakao yang populer termasuk *cocoa butter*, coklat pasta, coklat Batangan, dan coklat bubuk.

Cocoa butter, sebagai salah satu produk olahan biji kakao, menjadi salah satu unggulan ekspor Indonesia. *Cocoa butter* berasal dari lemak padar dengan titik leleh sekitar 32-35°C berwarna kuning terang, yang diekstrak dari biji kakao. Manfaat dari lemak kakao ini untuk industri makanan dan komestik serta Kesehatan kulit (Ditpui, 2021).

Menurut data *Internastional Cocoa Organization (ICCO)*, produksi kakao dunia mencapai 3,67 juta ton pada tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 7,99% dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,24%. Pantai Gading merupakan produsen terbesar kakao dunia dengan produksi mencapai 2,20 juta ton, diikuti oleh Ghana dengan produksi sebesar 700.000ton dan Ekuador dengan produksi sekitar 400.000 ton. Indonesia menempati posisi ketujuh dalam daftar produsen kakao dunia dengan produksi sebesar 180.000 ton.

Gambar 1.1
Produksi Kakao Dunia (Ribu Ton)



Sumber: *International Cocoa Organization* (Data diolah)

Meskipun Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai produsen kakao dunia, potensi penurunan produksi kakao tetap memungkinkan. Tanaman kakao sering menghadapi tantangan seperti fluktuasi iklim, luas lahan yang semakin terbatas dan produktivitas tanaman yang menurun. Tantangan dalam proses penanaman kakao juga dapat mempengaruhi harga komoditas tersebut. Kenaikan harga selama proses produksi berpotensi meningkatkan harga jual barang hasil produksi dan sebaliknya. Kenaikan harga dapat mengakibatkan penurunan akan komoditas kakao.

Luas perkebunan yang luas mendukung produksi kakao dan ketersediaan pasokan yang cukup (Aziziah & Setiawina, 2021). Berdasarkan studi (Alkamalia et al., 2017) yang menyimpulkan bahwa “luas wilayah memiliki dampak yang signifikan dengan korelasi positif secara parsial dengan produksi kakao dari perkebunan rakyat di Provinsi Aceh”. Namun, luas Perkebunan kakao di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, luas Perkebunan kakao mencapai 16,1 juta hektar, tetapi mengalami penurunan sebesar 11,79% menjadi 14,2 juta hektar pada tahun 2022. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh konservasi lahan ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan (BPS, 2023). Penyusutan luas lahan kakao berdampak langsung pada produksi yang mencapai 650,6 ribu ton pada tahun 2022.

Provinsi Sulawesi Tengah adalah produsen kakao terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 130.848ton atau sekitar 20,11% dari total produksi biji kakao di negara ini. Diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara yang menduduki posisi kedua dengan produksi sebesar 104.649ton atau sekitar 16,08%. Mayoritas produksi biji kakao di Indonesia berasal dari, perkebunan rakyat mencapai

649.394ton atau 99,81% pada tahun 2022. Diikuti perkebunan besar swasta sekitar 1165ton atau 0,18% dan perkebunan besar negara sebesar 53ton atau 0,01%.

Sebelum diterapkannya kebijakan bea ekspor tahun 2009, sekitar 93% biji kakao mentah diekspor ke luar negeri (Trisanti Saragih et al., 2021). Nilai eksportnya senilai US\$ 1,08 miliar tahun 2009 kemudian meningkat menjadi US\$ 1,19 miliar tahun 2010.

Biji kakao masih mendominasi dalam bentuk mentah dalam ekspor, yang sering kali menyebabkan biji kakao Indonesia mendapatkan diskon dalam harga eksportnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa harga biji kakao yang tercatat di bursa komoditas New York umumnya mencerminkan harga biji kakao yang telah mengalami proses fermentasi (Trisanti Saragih et al., 2021). Sebagai salah satu produsen terbesar biji kakao, Indonesia memasok bahan mentah untuk industri pengolahan kakao di negara lain. Fenomena ini terbukti dengan adanya peningkatan industri pengolahan kakao di negara-negara yang sebelumnya tidak menghasilkan biji kakao sebagai bahan mentah bagi industri.

Sebagai produsen terbesar biji kakao, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri hilir kakao, sesuai dengan upaya pemerintah untuk memajukan kakao dalam bentuk olahan maupun biji. Oleh karena itu, pemerintah telah memulai langkah hilirisasi kakao dengan memperkuat industri pengolahan kakao di dalam negeri dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK.011/2010 dengan tujuan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri (Haifan, 2015).

Pemerintah telah menerapkan kebijakan Bea Ekspor sebagai salah satu langkah dalam memajukan industri pengolahan kakao sejak awal tahun 2000-an.

Tahun 2007, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dalam perdagangan biji kakao di dalam negeri ditiadakan. Kebijakan ini diharapkan dapat membentuk lingkungan usaha yang mendukung bagi perusahaan pengolahan kakao, tampaknya belum berhasil sepenuhnya. Dari 40 perusahaan pemrosesan kakao yang ada sebelumnya, hanya tersisa 15 diantaranya yang mampu bertahan setelah penghapusan PPN. Namun, tidak semua dari 15 perusahaan tersebut dapat beroperasi secara efektif. Hanya lima perusahaan yang berhasil menjaga operasionalnya, sementara 10 lainnya terpaksa menghentikan kegiatan operasional mereka. Tiga tahun setelahnya, kebijakan baru mengenai pajak ekspor yang sebagai kebijakan Bea Keluar baru diterapkan pada tahun 2010.

Tahun 2010, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pungutan ekspor yang progresif untuk setiap ton transaksi ekspor biji kakao, dimana besaran pajak ekspor tergantung pada harga ekspor patokan *CIF New York Board of Trade (NYBOT)* di New York. Pengenalan pajak ekspor ini memunculkan sudut pandang yang berbeda diantara produsen biji kakao dan pengusaha pengolahan kakao sebagai pelanggan. Bagi produsen biji kakao, pungutan ekspor berpotensi mengurangi surplus mereka karena keuntungan produsen akan tergerus oleh pajak ekspor. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa implementasi pajak ekspor terhadap biji kakao dapat meningkatkan daya saing dan ekspor kakao Indonesia dalam bentuk olahan.

Tingginya permintaan internasional terhadap biji kakao mendorong produsen untuk lebih memilih menjual biji kakao di pasar luar negeri daripada pasar domestik. Akibatnya, pasokan biji kakao di dalam negeri menjadi terbatas yang kemudian menyulitkan pabrik-pabrik pengolahan biji kakao untuk memperoleh pasokan yang memadai. Untuk mengatasi masalah pasokan dalam negeri ini,

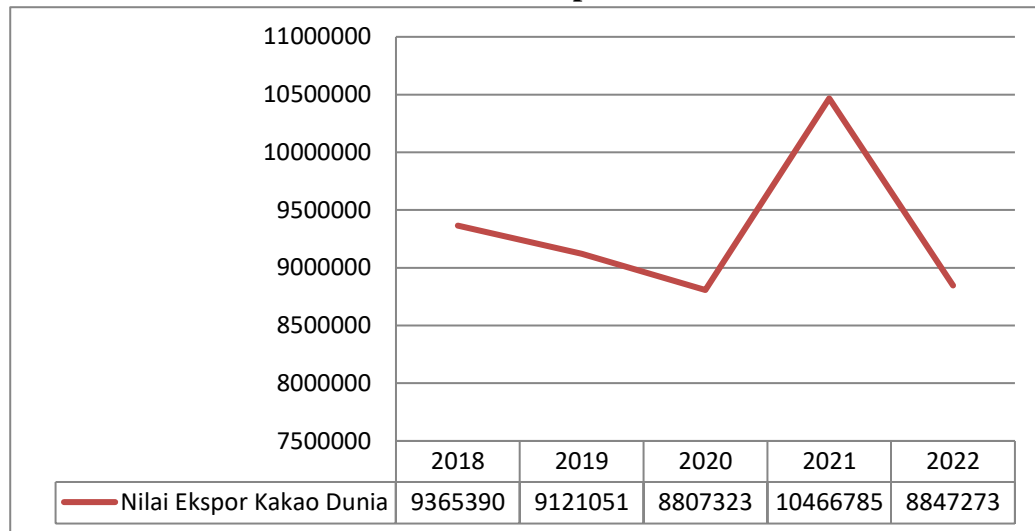
pemerintah akhirnya menerapkan pajak ekspor. Kebijakan perdagangan pemerintah khususnya dalam dalam konteks ini, berpotensi menciptakan gejolak di pasar biji Kakao, baik pasar domestik dan internasional. (Dominick Salvatore, 1997), mengonfirmasi bahwa tindakan seperti ini akan mengakibatkan fluktuasi harga di pasar lokal dan global. Prinsipnya adalah bahwa instrumen kebijakan yang dipilih harus menguntungkan industri secara keseluruhan.

Namun, penerapan kebijakan tarif ekspor kakao, mengakibatkan penurunan volume ekspor biji kakao dan pendapatan bagi produsen yang melakukan ekspor kakao juga ikut berkurang. Dampak kebijakan bea ekspor terhadap produsen kakao adalah terjadinya penurunan harga kakao di tingkat domestik (Ananda et al., 2018). Pasar internasional kakao bersifat kompetitif, sehingga setiap peningkatan pajak ekspor akan langsung mempengaruhi penurunan harga kakao di pasar domestik dibandingkan dengan harga kakao internasional dan harga kakao domestik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Permani, 2013) jika semakin tinggi tarif ekspor yang diterapkan, maka surplus konsumen dan penerimaan pemerintah semakin meningkat.

Komoditas biji kakao (HS 1801) berperan signifikan dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1930. Ekspor biji Kakao Indonesia mencakup lima benua yaitu Asia, Afrika, Oseania, Amerika, dan Eropa dengan pangsa pasar utama di Asia. Berdasarkan data *Harmonized System* (HS) untuk kakao tahun 2022, terdapat 16 HS utama dari komoditas ekspor kakao Indonesia. Kakao Butter (HS 18040000) menjadi yang paling dominan dengan volume ekspor 153,75 ribu ton atau 39,89% dari total ekspor kakao. Diikuti oleh tepung kakao (HS 18050000) sebanyak 112,28 ribu ton atau 29,13% dan kakao pasta (HS 18032000) sebanyak 49,23 ribu ton atau

sekitar 12,77%. Total volume ekspor kakao secara keseluruhan adalah 385.421 ton (BPS, 2022).

Gambar 1.2
Grafik Nilai Ekspor Dunia



Sumber : UN COMTRADE (Data diolah)

Nilai ekspor biji kakao global mengalami fluktuasi setiap tahun, mencatat peningkatan tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai 10.466.785 US\$. Pantai Gading tetap menjadi produsen kakao terbesar di dunia, diikuti oleh Ghana dan Ekuador.

Selama lima tahun terakhir, volume dan nilai ekspor biji kakao Indonesia juga mengalami fluktuasi. Tahun 2018 volume ekspor kakao mencapai 380.827ton dengan total nilai ekspor US\$ 1,25 miliar. Namun, volume tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 358.481ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,20 miliar. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga 2022 volume ekspor kakao mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2021, peningkatan volume ekspor kakao tidak diimbangi dengan peningkatan nilai ekspor.

Saat ini, industri pengolahan kakao di dalam negeri tersebar di enam provinsi diantaranya Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara,

dan Sulawesi Tenggara. Kebijakan pengenaan bea ekspor telah berhasil menarik investasi dari perusahaan multinasional di Indonesia. Perusahaan multinasional yang menghasilkan produk olahan kakao untuk diekspor ke negara asalnya tidak terkena bea ekspor sehingga operasional industri utamanya dapat berjalan dengan lancar tanpa kekhawatiran kekurangan bahan baku.

Ekspor produk *intermediate* kakao olahan telah menjadikan Indonesia sebagai penyedia utama dalam rantai pasokan global dengan kontribusi 9,17% dari total kebutuhan dunia (Putu, 2023). Peningkatan ekspor kakao olahan didorong oleh kebijakan bea ekspor terhadap ekspor biji kakao yang telah menarik investor untuk mengembangkan industri pengolahan kakao. Akibat investasi tersebut, kapasitas produksi industri pengolahan kakao telah meningkat dari 560.000 ton per tahun menjadi 739.250 ton per tahun. Indonesia telah menjadi pemain utama dalam pasar global kakao olahan yang posisinya berada di peringkat kedua dunia setelah Belanda dalam ekspor *cocoa butter* (Eri dan Elvira, 2023).

Seiring dengan pertumbuhan industri pengolahan kakao, produksi biji kakao domestik mengalami penurunan yang cukup mencolok dari 837.918ton pada tahun 2010 menjadi 650.612ton pada tahun 2022. Karena penurunan produksi tersebut, pelaku industri lebih memilih untuk mengimpor biji kakao guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Akibatnya, impor biji kakao mengalami peningkatan yang drastis dari 47.453 pada tahun 2010 menjadi 146.833 di tahun 2022 meskipun ada kebijakan bea ekspor untuk mengurangi volume ekspor biji kakao yang dapat digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, penurunan produktivitas biji kakao dan semakin sempitnya lahan menjadikan produksi biji kakao Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Dengan turunnya produksi biji kakao di Indonesia negara harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Negara-negara eksportir biji kakao Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Ekuador, Pantai Gading, dan Nigeria. Impor kakao Indonesia terutama dalam bentuk kakao biji *not fermented* (HS 18010090) yaitu sebesar 72,49 ribu atau 49,37% dari total impor kakao (BPS, 2022).

Perkembangan volume dan nilai impor kakao Indonesia di tahun 2018 hingga 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, volume impor mencapai 309.737 ton, kemudian turun 243.334ton pada tahun 2020 dengan nilai US\$ 650,71 juta. Selanjutnya tahun 2022 volume dan nilai impor kakao Indonesia mengalami penurunan drastis, hanya mencapai 146.833ton atau US\$ 447,71 juta.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini menjadi penting untuk memahami apakah adanya kebijakan bea ekspor efektif dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri kakao. Kemudian penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong peningkatan ekspor *cocoa butter* di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas judul “Analisis Dampak Kebijakan Bea Ekspor, Jumlah Produksi Biji Kakao, dan Impor Biji Kakao terhadap Ekspor *Cocoa Butter* di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat dugaan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor *cocoa butter* adalah kebijakan bea ekspor, jumlah produksi, dan impor biji kakao.

Dengan demikian pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan bea ekspor berpengaruh terhadap volume ekspor *cocoa butter* dalam jangka pendek dan jangka panjang?

2. Apakah jumlah produksi biji kakao berpengaruh terhadap volume ekspor *cocoa butter* dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah impor biji kakao berpengaruh terhadap volume ekspor *cocoa butter* dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan bea ekspor terhadap volume ekspor *cocoa butter* dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah produksi biji kakao terhadap volume ekspor *cocoa butter* dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk menganalisis pengaruh impor biji kakao terhadap volume Ekspor *cocoa butter* dalam jangka pendek dan jangka panjang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis mendapatkan pengetahuan baru mengenai variabel-variabel yang diteliti dan bagaimana dampaknya terhadap volume ekspor *cocoa butter*.

2. Untuk universitas

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi semua mahasiswa yang berencana mengambil topik penelitian serupa, sebagai dasar perbandingan bagi penelitian mereka.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menggunakan sebagai referensi dalam membuat kebijakan terkait ekspor *cocoa butter* Indonesia.

2. Untuk pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembandingan penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup pembahasan yang sama.